

TESIS

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG REVOLUSI HIJAU
DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI
KABUPATEN BANJAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S2)



**Oleh:
SULIYANTI
NIM. 2120419320016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau di Kesatuan
Pengelolaan Hutan Kayu Tangi Kabupaten Banjar

Nama : SULIYANTI
NIM : 2120419320016
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Disetujui Komisi Penguji


Drs. TAUFIK ARBAIN, S.Sos, M.Si

Ketua


Prof. Dr. H. ASMU'L, M.Si

Anggota


Dr. JAMALUDDIN, M.Si

Anggota

Mengetahui

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. TAUFIK ARBAIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19740307200212 1 003


Prof. Dr. H. BUDI SURYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19730122 199802 1 001

Tahun Lulus 2023

Tanggal Wisuda :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Suliyanti
NIM	: 2120419320016
Program studi	: Magister Administrasi Publik
Program Pasca Sarjana	: Universitas Lambung Mangkurat

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah saya dengan judul ***“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau di Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi Kabupaten Banjar”*** adalah asli (orisinil) benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, atau tidak plagiat (menjiplak) serta data yang ada di dalam tesis ini bukan merupakan hasil manipulasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan yang palsu maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dibuat di: Banjarbaru
Pada Tanggal: 23 Juni 2023
Yang Menyatakan

Suliyanti

ABSTRAK

SULIYANTI NIM. 2120419320016, Pembimbing Dr. Taufik Arbain, M.Si, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau di Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi Kabupaten Banjar”.

Penelitian ini berangkat dari kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungan yang memiliki Sumber Daya Alam yang potensial dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau sebagai salah satu upaya mencapai tujuan. Namun kondisi ini kurang dikelola dengan baik dimana kerusakan lingkungan dari luasan tutupan lahan bervegetasi yang sangat memprihatinkan yang disebabkan oleh penebangan liar (*Illegal logging*), eksploitasi hutan yang berlebihan, alih fungsi lahan yang tidak sesuai fungsinya yang berujung pada memburuknya kondisi lingkungan sehingga menyebabkan banjir, kekeringan, kebakaran dan penurunan daya dukung sungai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu : 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Data display, 4. *Conclusion darawing / verification*. Informan penelitian terdiri dari unsur Pemerintahan, Swasta dan Masyarakat.

Berdasarkan hasil hasil penelitian 1.Aspek Regulasi Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan yaitu Hasil observasi menunjukkan sikap para pelaksana menerima dengan baik dan tidak ada penolakan dari program tersebut karena ditujukan untuk perbaikan kondisi lingkungan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan program ini, meliputi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah. Strategi pelibatan seluruh komponen masyarakat serta komunikasi yang terus dibangun antar pihak yang berkepentingan mulai dari perancangan peraturan pelaksanaan, sosialisasi program, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mampu menjawab tantangan dan hambatan serta menciptakan hubungan tata cara kerja yang efektif untuk percepatan pencapaian tujuan. 2. Aspek Pemeliharaan Lingkungan (Penanaman dan Pembibitan) yaitu Kegiatan penanaman dan pembibitan sudah berjalan hal ini dapat dilihat dari berkurangnya lahan kritis yang sudah ditanami. Adanya sinergitas program antar Pemprov/Pemkab/SKPD dan Perusahaan/Industri Kayu dengan Gerakan Revolusi Hijau, diantaranya ASN menanam, Program Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Gamis Hijau, Program Menanam Bersama Manis, Program Kampung Iklim, serta Kewajiban untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sekitar Daerah Aliran Sungai untuk pemegang izin pengelolaan hutan memudahkan kegiatan penanaman dan pembibitan yang dilakukan. 3.Aspek Perubahan Pola Pikir yaitu Proses perubahan pola pikir telah berjalan, dengan menanam dan memelihara hutan, masyarakat mempunyai orientasi ke masa depan, dan dalam pelaksanaannya terjalin komunikasi yang baik, kolaboratif, Interaktif, adaptif, berkelanjutan. Upaya KPH Kayu Tangi untuk membangun kolaborasi dan membina masyarakat dalam menjaga dan mengelola hutan, dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan dengan berbagai skema yang disepakati bersama antara kedua belah pihak, seperti dalam pengembangan usaha HHBK, pembuatan persemaian sementara, pembuatan demplot dan penghijauan/reboisasi. Faktor pendukung yaitu : 1.Adanya kerjasama antara Masyarakat, KPH, Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Kementerian, dan Pemegang Izin, NGO/LSM dan perguruan tinggi melalui wadah forum multi pihak. 2. Telah tercipta paradigma pengelolaan hutan yang memandang bahwa hutan bukan hanya menghasilkan kayu tetapi juga non kayu dan jasa lingkungan. 3. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan pemberdayaan kelembagaan hutan sosial. Faktor penghambat : 1.Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Revolusi Hijau 2. Masih kurangnya ketersediaan Sumberdaya Manusia yang kompeten. 3. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan Revolusi Hijau. Hasil analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa keempat dimensi dari teori Implementasi Edward III yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau telah terlaksana atau diimplementasikan.

Hasil penelitian ini menyarankan agar: 1). Mengembangkan skema pendanaan alternatif selain APBD/APBN. 2).Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pegawai. 3).Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Pemkab/Swasta dalam penyediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan Revolusi Hijau.

Kata Kunci : *Implementasi, Gerakan Revolusi Hijau*

ABSTRACT

SULIYANTI NIM. 2120419320016,2023, “Implementing South Kalimantan Province Regulation Number 07 of 2018 Concerning The Green Revolution in the KPH Kayutangi Area, Banjar Regency” Advisor Dr. Taufik Arbain, M.Si.,

This research stems from the concern of the South Kalimantan Provincial Government regarding the environmental conditions that possess potential natural resources, as reflected in the issuance of Regional Regulation No. 7 of 2018 on the Green Revolution as one of the efforts to achieve its goals. However, these conditions are poorly managed, resulting in alarming environmental damage due to illegal logging, excessive exploitation of forests, and inappropriate land use changes, leading to deteriorating environmental conditions that cause floods, droughts, fires, and a decrease in river carrying capacity.

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. The data analysis techniques used were: 1. Data collection, 2. Data reduction, 3. Data display, 4. Conclusion drawing/verification. The research informants consisted of government officials, private sector representatives, and the community.

Based on the research findings, the following aspects were identified :1.Government Regulation Aspects in Policy Implementation: Observations showed that the implementers welcomed the program and there was no resistance, as it was aimed at improving the environmental conditions and the well-being of the community. Other parties were involved in the program implementation, including relevant government and non-governmental cross-sectoral agencies. The strategy of engaging all components of society and building continuous communication among stakeholders, starting from the design of implementation regulations, program socialization, planning, execution, and evaluation, proved to address challenges and obstacles and establish effective working relationships to accelerate goal achievement. 2. Environmental Maintenance Aspects (Planting and Seedling): Planting and seedling activities have been carried out, as evidenced by the reduction of critical land that has been planted. There is synergy between the Provincial Government, District/City Governments, relevant agencies, and wood industry companies through the Green Revolution Movement. The involvement of civil servants in planting activities, Forest and Land Rehabilitation Programs, Green Gamis Program, Joint Sweet Planting Program, Climate Village Program, and the obligation to carry out Forest and Land Rehabilitation activities in the Surrounding River Basin Areas for forest management permit holders facilitated the planting and seedling activities. 3. Mindset Change Aspects: The process of mindset change has been implemented, as communities plant and maintain forests with a future orientation, supported by good, collaborative, interactive, adaptive, and sustainable communication. The Kayu Tangi Forest Management Unit's efforts to build collaboration and engage communities in forest preservation and management, by involving them in various activities with agreed-upon schemes between both parties, such as developing community-based forest business, establishing temporary nurseries, creating demonstration plots, and conducting afforestation efforts. Supporting factors include: 1. Cooperation among communities, Forest Management Units, Provincial Forestry Offices, Ministry Agencies, Permit Holders, NGOs/Civil Society Organizations, and universities through multi-stakeholder forums. 2. The paradigm shift in forest management, recognizing forests not only for timber production but also for non-timber products and environmental services. 3. Community involvement in forest management through social forestry institutional empowerment. Obstacles include: 1. Insufficient budget for Green Revolution activities. 2. Limited availability of competent human resources. 3. Inadequate supporting infrastructure for Green Revolution activities. The analysis conducted indicates that the four dimensions of Edward III's implementation theory, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure in the implementation of Regional Regulation No. 7 of 2018 on the Green Revolution in South Kalimantan Province, have been implemented.

The findings of this research suggest the following recommendations: 1) Develop alternative funding schemes besides the Regional Budget (APBD) and National Budget (APBN). 2) Improve the accountability of employees' performance. 3) Enhance cooperation with Ministries Agencies/Local Governments/Private sectors to provide supporting infrastructure for the Green Revolution activities.

Keywords: Implementation, Green Revolution Movement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau di Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi Kabupaten Banjar”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Dalam penyusunan, penulis mendapat banyak pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing pertama
2. Prof. Dr. H. Asmu'i M.Si selaku dosen penguji pertama
3. Dr. Jamaluddin, M.Si selaku dosen penguji kedua

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis selalu membuka masukan yang membangun dari para pembaca. Besar harapan penulis karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Tinjauan Konseptual	16
2.2.1 Kebijakan	19
2.2.2 Implementasi Kebijakan	29
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	30
2.2.4 Revolusi Hijau	34
2.2.5 Rehabilitasi Hutan dengan Revolusi Hijau	42
2.3 Gerakan Revolusi Hijau di Kabupaten Banjar	48
2.4 Kerangka Berpikir Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Pendekatan Penelitian	53
3.2 Tipe Pendekatan.....	54
3.3 Lokasi Penelitian.....	55
3.4 Informan Penelitian.....	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.6 Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	68
4.1 Lokasi Penelitian.....	68
4.2 Organisasi KPH Kayu Tangi	70
4.3 Gerakan Revolusi Hijau di Wilayah KPH Kayu Tangi	74
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
5.1 Hasil Penelitian	81
5.1.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau	81
5.1.1.1 Aspek Regulasi Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan.....	81
5.1.1.2 Aspek Pemeliharaan Lingkungan (Penanaman dan Pembibitan).....	90
5.1.1.3 Aspek Perubahan Pola Pikir Masyarakat	98
5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 Kebijakan Revolusi Hijau	102
5.1.2.1 Faktor Pendukung.....	102
5.1.2.2 Faktor Penghambat.....	106

5.2 Pembahasan.....	113
5.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau	113
5.2.1.1 Aspek Regulasi Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan.....	113
5.2.1.2 Aspek Pemeliharaan Lingkungan (Penanaman dan Rehabilitasi).....	119
5.2.1.3 Aspek Perubahan Pola Pikir Masyarakat	113
5.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018	126
5.2.2.1 Faktor Pendukung	126
5.2.2.2 Faktor Penghambat	131
BAB VI PENUTUP	134
6.1. Kesimpulan	134
6.2. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1	Daftar responden	56
Tabel 3.2	Jenis dan Sumber Data Yang Diperlukan Dalam Penelitian	60
Tabel 3.3	Jenis dan Sumber Data Yang Diperlukan Dalam Penelitian	61
Tabel 4.1.	Lahan Efektif yang bisa ditanami di KPH Kayu Tangi	75
Tabel 4.2.	Lahan Kritis diwilayah perijinan di Luar KPH Kayu Tangi	76
Tabel 4.3	Rencana Penanaman Revolusi Hijau 10 tahun di KPH Kayu Tangi dengan pola tanam 1.100 batang perhektar	77
Tabel 4.4	Rencana Penanaman Revolusi Hijau 10 tahun di KPH Kayu Tangi dengan pola tanam 625 batang perhektar	77
Tabel 4.5.	Rencana Penanaman 10 Tahun diluar KPH Kayu Tangi	78
Tabel 4.6.	Realisasi Penanaman Program Revolusi Hijau Tahun 2022	79
Tabel 5.1	Capaian Penanaman Gerakan Revolusi Hijau 2018-2021	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 3.1	Wilayah KPHL dan KPHP , KPH Kayutangi	64
Gambar 4.2	Wilayah KPHL dan KPHP , KPH Kayutangi	69
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Unit KPH Kayu Tangi berdasarkan Pergub. Kalsel Nomor. 23 Tahun 2017	71
Gambar 5.1.	Contoh Berita Acara Penanaman	84
Gambar 5.2	Dokumentasi ASN menanam	85
Gambar 5.3	Kegiatan penanaman PT. Borneo Indobara dengan KPH Kayu Tangi	86
Gambar 5.4	Kegiatan sosialisasi kegiatan revolusi hijau	88
Gambar 5.5	Kegiatan penanaman oleh KPH Kayu Tangi	94
Gambar 5.6	Kegiatan pembibitan dikebun bibit KPH Kayu Tangi	95
Gambar 5.7	Kegiatan penyaluran bibit untuk kegiatan penanaman	96
Gambar 5.8	Kelompok Tani Hutan yang ada di KPH Kayu Tangi	100
Gambar 5.9	Pembinaan kepada kelompokk tani oleh KPH Kayu Tangi	104
Gambar 5.10	Demplot kebun milik petani KPH Kayu Tangi	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Foto kegiatan	141
Lampiran 2	Quisioner penelitian	144
Lampiran 3	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Revolusi Hijau	154